

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL KREDIT  
INVESTASI, ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA,  
MODAL MANUSIA (PENDIDIKAN), PAJAK DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR  
WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Agnes Fatmawati  
115020101111043**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL KREDIT INVESTASI, ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA, MODAL MANUSIA (PENDIDIKAN), PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang disusun oleh :

Nama : Agnes Fatmawati  
NIM : 115020101111043  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 1 Juli 2015.

Malang, 1 Juli 2015

Dosen Pembimbing,

**Dr. Sasongko, SE., MS.**

NIP. 19530406 198003 1 004

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL KREDIT INVESTASI, ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA, MODAL MANUSIA (PENDIDIKAN), PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Agnes Fatmawati, Sasongko**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: agnez\_dd3@yahoo.com

**ABSTRAK**

*Ketimpangan pembangunan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2013.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (Fixed Effect Method) dan dummy wilayah. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat ketimpangan pembangunan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada alpha 5 persen variabel kredit investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sedangkan variabel angkatan kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.*

*Kata Kunci: ketimpangan antar wilayah, kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, pendidikan, pajak, pengeluaran pemerintah*

**A. PENDAHULUAN**

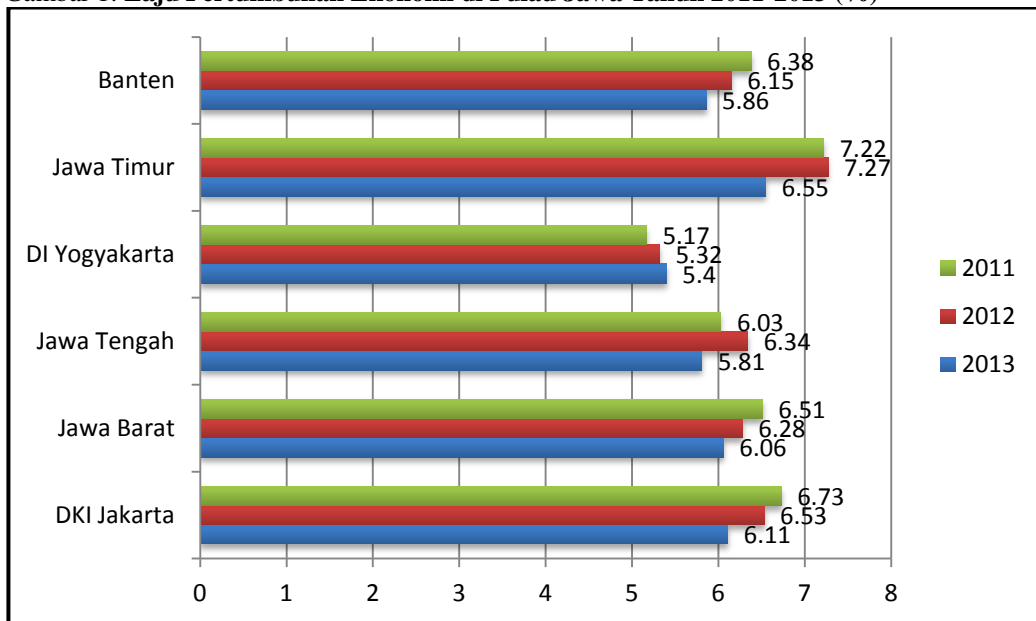
Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Pada penelitian ini dipilih Provinsi Jawa Timur sebagai obyek penelitian dikarenakan provinsi tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sempat berulang kali mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian apabila dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi-provinsi lainnya di pulau Jawa, Jawa timur juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul. Hal ini merupakan bukti bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar dan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013**

No	Keterangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	684.234	778.454	884.144	1.001.721	1.136.330
2	PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	320.861	342.281	366.984	393.666	419.430
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55
4	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4,55	6,10	6,50	6,23	5,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Gambar 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2013 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Namun dengan keunggulannya dalam pertumbuhan ekonomi, Provinsi Jawa Timur bukannya tanpa masalah, ternyata provinsi ini memiliki masalah dalam ketimpangan pembangunan. Masalah ketimpangan di Jawa Timur dapat dilihat dari terdapatnya perbandingan yang jauh antara Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan PDRB per kapita diatas rata-rata dengan PDRB per kapita dibawah rata-rata Jawa Timur. Pada tabel 2, hanya terdapat 7 kabupaten/Kota yang memiliki PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Provinsi, sedangkan 31 Kabupaten/Kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Provinsi.

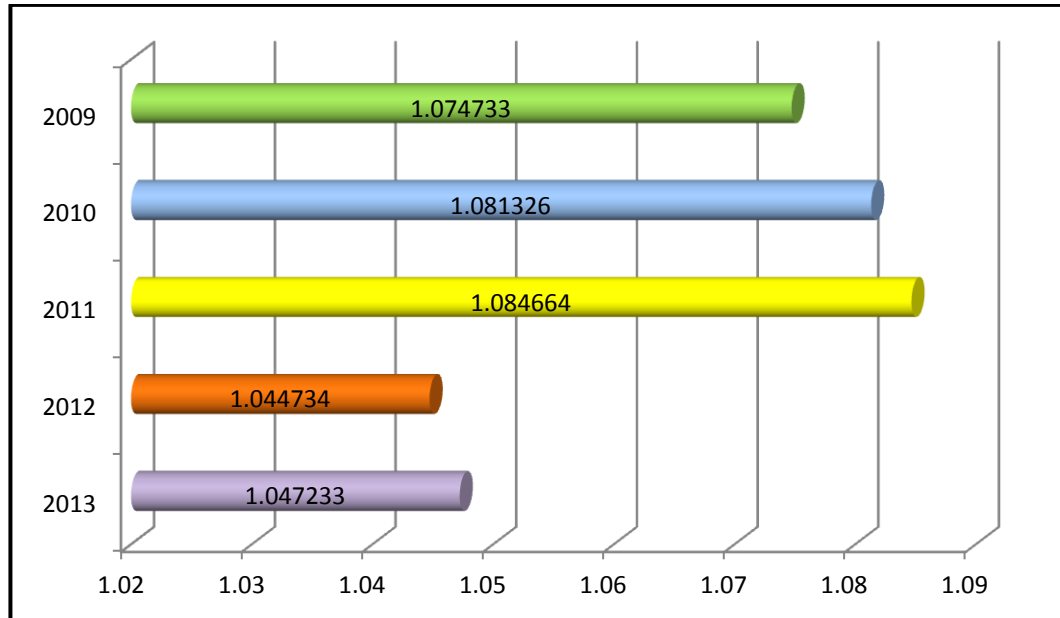
Tabel 2: PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Rupiah)

No	Kab/Kota	Nilai	No	Kab/Kota	Nilai
1	<b>Kota Kediri</b>	<b>98.090.602,24</b>	20	Kab. Situbondo	6.453.027,795
2	<b>Kota Surabaya</b>	<b>38.674.715,72</b>	21	Kab. Lamongan	6.396.147,337
3	<b>Kota Malang</b>	<b>20.643.897,33</b>	22	Kab. Magetan	6.298.747,808
4	<b>Kab. Gresik</b>	<b>16.960.016,71</b>	23	Kab. Jombang	6.252.132,684
5	<b>Kab. Sidoarjo</b>	<b>15.650.475,67</b>	24	Kab. Nganjuk	6.203.692,474
6	<b>Kota Madiun</b>	<b>15.164.620,02</b>	25	Kab. Blitar	6.042.277,327
7	<b>Kota Mojokerto</b>	<b>12.088.729,22</b>	26	Kab. Kediri	6.036.640,819
8	Kota Probolinggo	10.988.967,35	27	Kab. Sumenep	5.955.340,465
9	Kab. Tulungagung	9.445.523,399	28	Kab. Jember	5.948.560,309
10	Kota Batu	9.237.597,368	29	Kab. Madiun	5.507.398,297
11	Kab. Mojokerto	9.164.037,321	30	Kab. Trenggalek	5.406.324,842
12	Kab. Tuban	9.048.398,568	31	Kab. Pasuruan	5.354.977,134
13	Kota Blitar	8.815.125,79	32	Kab. Bondowoso	5.022.077,071
14	Kab. Banyuwangi	8.537.740,066	33	Kab. Ponorogo	4.609.591,557
15	Kab. Bojonegoro	8.045.022,937	34	Kab. Ngawi	4.589.052,617
16	Kab. Lumajang	7.493.927,485	35	Kab. Bangkalan	4.418.976,221
17	Kab. Probolinggo	7.251.177,337	36	Kab. Sampang	3.787.005,514
18	Kab. Malang	7.135.941,835	37	Kab. Pacitan	3.410.594,342
19	Kota Pasuruan	7.005.213,927	38	Kab. Pamekasan	3.150.932,624
Rata-Rata		11.060.137,57			

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Kemudian pengukuran ketimpangan melalui indeks ketimpangan Williamson Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dan nilainya selama tahun 2009-2013 berturut-turut adalah 1.074733 (2009); 1.081326 (2010); 1.084664 (2011); 1.044734 (2012); dan 1.047233 (2013). Angka tersebut menunjukkan nilai yang sangat tinggi yaitu di atas angka 1. Pada teorinya angka indeks Williamson yang melebihi angka maksimum dikarenakan adanya beberapa daerah yang memiliki hyper PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi.

Gambar 2: Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur sangat tinggi, sehingga penting untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan melalui teori Neoklasik dan Keynes. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu: Robert Solow dan Trevor Swan. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2005).

#### a. Model Pertumbuhan Tanpa Perkembangan Teknologi

$$Y_t = f(K_t, L_t)$$

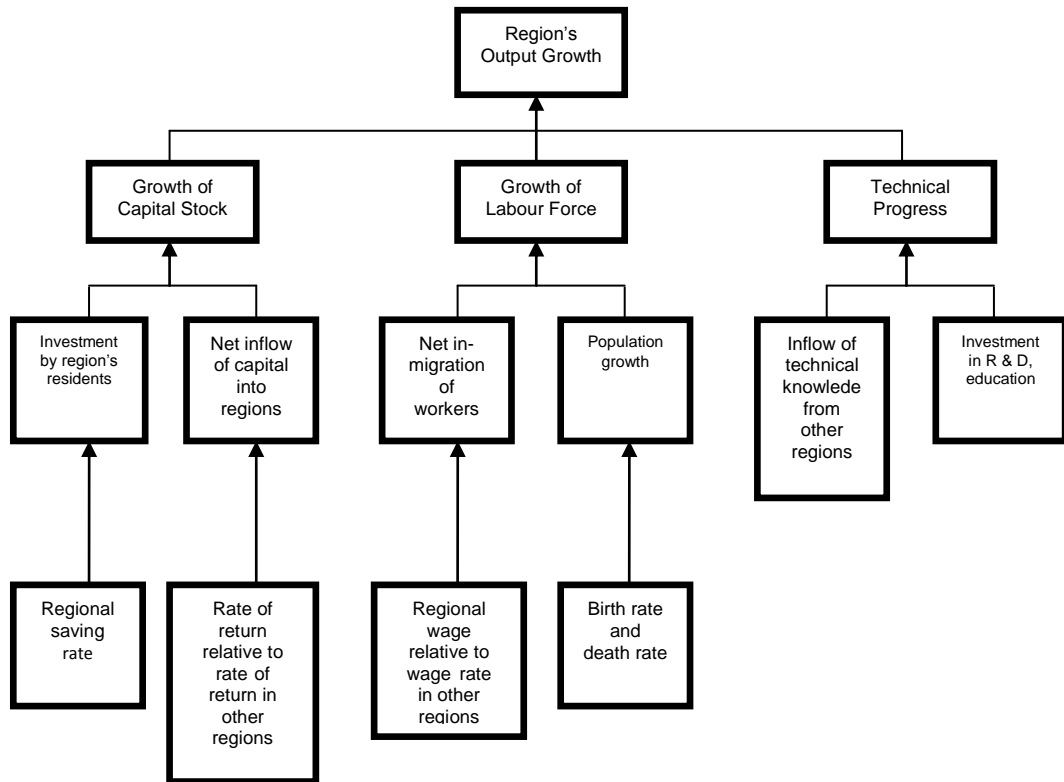
Dengan  $Y$  adalah pendapatan riil,  $K$  adalah stok modal,  $L$  adalah tenaga kerja dan  $t$  adalah subskrip untuk waktu.

#### b. Model Pertumbuhan Dengan Perkembangan Teknologi

$$Y_t = f(A_t, K_t, L_t)$$

Dengan  $A$  adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dikatakan tidak melekat dalam model karena tidak tergantung dari masukan modal dan tenaga kerja.

Gambar 3: **Persediaan Faktor dan Pertumbuhan Output Regional**



Sumber : Armstrong dan Taylor, 2000

### Toeri Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen beranggapan bahwa ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Ilmu pengetahuan adalah input penting ke dalam produksi perekonomian baik produksi barang dan jasanya maupun produksi ilmu pengetahuan barunya. Tidak tepat jika mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan memiliki muatan pengembalian yang kian menurun. Tentu saja inovasi sains dan teknologi yang terus meningkat membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa ada pengembalian ilmu yang meningkat.

### Toeri Keynes

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah:

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi, (I) Investasi, (G) adalah Pengeluaran pemerintah dan (NX) adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997).

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laizes-faire capitalism* (**teori kapitalisme**).

Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

### C. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis data sekunder untuk 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2009 – 2013. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Variabel yang digunakan yaitu kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, serta variabel ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai variabel dependen.

#### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode data panel. Analisis data panel merupakan kombinasi dari deret waktu (time-series) dan kerat lintang (cross-section). Model yang digunakan dalam penelitian ini secara spesifik adalah model pertumbuhan ekonomi Neoklasik Solow dan Keynesian. Berikut fungsi pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran agregat oleh model Neoklasik:

$$Y = f(K, L, A)$$

Dimana K adalah kapital, L adalah angkatan kerja yang bekerja dan A adalah kemajuan teknologi.

Kemudian fungsi pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat oleh model Keynesian :

$$Y = C + I + G + NX$$

Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam model berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \ln\beta_1 X1_{it} + \ln\beta_2 X2_{it} + \ln\beta_3 X3_{it} + \ln\beta_4 X4_{it} + \ln\beta_5 X5_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan Pembangunan Wilayah (indeks Williamson)

i = Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

t = Waktu (2009 hingga 2013)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_5$  = Koefisien

X1 = Kredit Investasi (rupiah)

X2 = Angkatan kerja yang bekerja (jiwa)

X3 = Modal Manusia (Pendidikan) (jiwa)

X4 = Pajak (rupiah)

X5 = Pengeluaran Pemerintah (rupiah)

$\varepsilon$  = Error Term

Dalam regresi data panel ada tiga macam pendekatan yaitu pendekatan Common Effect Method (CEM), pendekatan Fixed Effect Method (FEM) dan pendekatan Random Effect Method (REM). Untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan adalah dengan menggunakan uji Chow dan Uji Hausman. Kemudian uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian menggunakan data panel ini adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dideteksi menggunakan correlation matrix dengan kriteria tingkat korelasi yang cukup tinggi antar 2 variabel bebas yaitu apabila  $r > 0,8$ . Pada penelitian ini hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa antar kelima variabel bebas tidak terdapat masalah multikolinearitas, yaitu dengan semua nilai  $r < 0,8$ .

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	0.053380	0.450423	0.573390	0.368539
X2	0.053380	1.000000	0.687957	0.469304	0.607539
X3	0.450423	0.687957	1.000000	0.788525	0.630119
X4	0.573390	0.469304	0.788525	1.000000	0.691574
X5	0.368539	0.607539	0.630119	0.691574	1.000000

Sumber: Eviews 8, data diolah

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan variasi dari error term yang tidak konstan. Hal tersebut mengakibatkan parameter yang diduga menjadi tidak efisien akibat besaran varians selalu berubah-ubah. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji White.

Tabel 4: Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	7.942982	Prob. F(5,184)	0.0000
Obs*R-squared	33.72968	Prob. Chi-Square(5)	0.0000
Scaled explained SS	205.4397	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Sumber: Eviews 8, data diolah

Pada penelitian ini hasil uji white menunjukkan nilai probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0.0000 yaitu di bawah alpha sebesar 0.05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada model ini masih terdapat masalah heteroskedastisitas. Namun masalah heteroskedastisitas dapat diatasi yakni dengan menggunakan metode cross-section weights yaitu GLS dengan menggunakan estimasi varians residual cross-section.

**Penentuan Model Estimasi**

a. Uji Chow

Tabel 5: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: KETIMPANGAN			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2469.388297	(37,147)	0.0000

Sumber: Eviews 8, data diolah

Hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0.0000 atau di bawah alpha 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah FEM (Fixed Effect Method).

b. Uji Hausman

Tabel 6: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: KETIMPANGAN			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	42.353818	5	0.0000

Sumber: Eviews 8, data diolah

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.0000 atau di bawah alpha 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah FEM (Fixed Effect Method).



## Hasil Regresi Data Panel

Tabel 7: Hasil Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Method (FEM)

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keputusan
Kredit Investasi (x1)	0.000245	0.1172	Tidak Signifikan
Angkatan Kerja yang Bekerja (x2)	-0.006805	0.0002	Signifikan
Modal Manusia (Pendidikan) (x3)	0.000538	0.2644	Tidak Signifikan
Pajak (x4)	-0.001948	0.0005	Signifikan
Pengeluaran Pemerintah (x5)	-0.004661	0.0000	Signifikan
R-squared	0.998801		
Prob (F-statistic)	0.000000		

a. Uji F

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diperoleh nilai probabilitas  $F_{stat}$  sebesar 0.000000 dimana hasil tersebut adalah lebih kecil dari *significant level* (tingkat kesalahan)  $\alpha = 5\%$ . Hasil uji ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dimana semua variabel bebasnya (independent variable) secara bersama-sama mempengaruhi variable terikatnya (dependent variable).

b. Uji  $R^2$

Selain itu, juga didapat nilai  $R_{squared}$  sebesar 0.998801. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel bebasnya (independent variable) mampu menjelaskan variabel terikatnya (dependent variable) sebesar 99% dan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

c. Uji t

Hasil uji t menjelaskan bahwa tiga variabel bebas (independent variable) yaitu angkatan kerja yang bekerja, pajak dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dua variabel bebas kredit investasi dan modal manusia (pendidikan) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

### Implikasi Penelitian Ketimpangan Pembangunan di Jawa Timur

a. Pengaruh Kredit Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur

Kredit investasi memiliki hubungan positif dengan koefisien 0.000245 namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan teori, aliran neoklasik mengatakan bahwa modal memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi atau output suatu wilayah, apabila modal meningkat maka akan terjadi peningkatan pula pada output yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun perbedaan dalam besaran modal antar daerah akan menimbulkan adanya ketimpangan. Selain itu, menurut neoklasik, modal akan mengalir dari daerah maju (yang memiliki kelebihan modal) ke daerah tertinggal (yang memiliki sedikit modal) atau dengan kata lain terjadi mobilitas faktor yang sempurna. Daerah dengan perekonomian maju (tingkat pertumbuhan tinggi) memiliki pengembalian (return) yang lebih rendah salah satunya karena terjadinya persaingan yang tinggi antar pemilik modal di daerah tersebut sehingga dapat menaikkan upah dan sebaliknya menurunkan keuntungan, dengan demikian para pengusaha/investor akan memilih wilayah dengan tingkat upah yang rendah sebagai wilayah usahanya (Armstrong dan Taylor, 2000).

Pada penelitian ini variabel kredit investasi, yaitu jumlah penyaluran kredit investasi oleh bank umum dan bank BPR, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan aliran dana kredit investasi tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah maupun ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Melalui data aliran dana kredit perbankan menurut sektor ekonomi (pada tabel 4.8) diketahui bahwa kredit perbankan banyak mengalir ke sektor Industri dan Perdagangan, Restoran dan Hotel. Rata-rata posisi kredit selama tahun 2013 di sektor industri mencapai 89.665.630 juta rupiah dan pada sektor perdagangan, restoran dan hotel

mencapai 75.879.508 juta rupiah, nilai kedua sektor tersebut lebih unggul daripada nilai ketujuh sektor ekonomi lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 8: **Posisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Juta Rupiah)**

Bulan	Pertanian	Pertambangan	Industri	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi
Januari	8.384.553	3.023.236	79.831.315	4.849.245	8.463.244
Februari	8.509.354	2.920.984	80.677.298	4.821.563	8.742.251
Maret	8.708.474	2.926.942	82.269.874	4.835.555	9.044.438
April	9.102.152	2.928.863	83.406.786	4.784.662	9.320.490
Mei	9.780.008	2.835.275	84.020.095	4.750.396	9.943.186
Juni	10.291.961	2.746.270	87.745.204	5.158.428	9.942.731
Juli	9.820.187	2.885.708	89.502.809	5.403.108	10.720.783
Agustus	9.578.965	2.850.173	94.457.145	5.521.160	10.979.676
September	9.681.373	2.611.794	99.319.941	3.249.582	11.570.742
Oktober	9.705.017	2.638.892	96.762.080	3.095.045	11.500.590
Nopember	9.944.575	3.000.977	100.676.420	3.064.922	11.740.567
Desember	8.034.154	2.881.014	97.318.597	2.345.309	9.553.832
<b>Rata-rata</b>	<b>9.295.064</b>	<b>2.854.177</b>	<b>89.665.630</b>	<b>4.323.248</b>	<b>10.126.878</b>
Bulan	Perdagangan, Restoran dan Hotel	Angkutan dan Komunikasi	Keuangan, Persewaan dan Js Prsh	Jasa-Jasa	
Januari	65.304.503	9.585.533	1.175.046	7.286.574	
Februari	65.891.972	9.632.484	1.740.633	7.590.433	
Maret	68.203.641	9.902.140	1.806.995	7.249.821	
April	69.220.015	9.970.293	1.842.631	7.584.611	
Mei	70.537.224	9.991.124	1.842.462	7.828.219	
Juni	78.682.540	10.423.548	1.559.512	4.406.781	
Juli	80.946.573	10.946.127	2.127.269	4.539.250	
Agustus	80.191.145	11.077.156	1.573.482	4.602.359	
September	82.755.703	11.112.092	1.595.256	4.710.024	
Oktober	84.648.233	11.199.454	1.593.591	4.749.321	
Nopember	85.684.493	11.599.227	1.609.194	4.892.518	
Desember	78.488.048	10.531.637	1.704.976	4.141.022	
<b>Rata-rata</b>	<b>75.879.508</b>	<b>10.497.567</b>	<b>1.680.920</b>	<b>5.798.411</b>	

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Namun, besarnya aliran kredit ke sektor industri serta perdagangan, hotel dan restoran tersebut tidak memberikan efek yang sama pada laju pertumbuhan PDRB sektoral pada kedua sektor tersebut. Pada data di tabel 4.9 ditunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar 0.055803 dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0.097869. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK tertinggi adalah pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 0.103983, padahal kredit investasi tidak banyak mengalir ke sektor tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dana kredit investasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan wilayah serta ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 9: **Laju PDRB ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Miliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	Pertanian	0.02232	0.025305	0.034877	0.015903	<b>0.024601</b>
2	Pertambangan dan Penggalian	0.091839	0.060757	0.023197	0.033033	<b>0.052206</b>
3	Industri Pengolahan	0.043228	0.060649	0.063424	0.05591	<b>0.055803</b>
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.064326	0.062472	0.062114	0.047356	<b>0.059067</b>
5	Konstruksi	0.066427	0.091173	0.070509	0.090763	<b>0.079718</b>
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.106739	0.098053	0.100564	0.086121	<b>0.097869</b>
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.100735	0.114404	0.096462	0.104332	<b>0.103983</b>
8	Keuangan, real estate dan Jasa Perusahaan	0.072669	0.081815	0.079076	0.076828	<b>0.077597</b>
9	Jasa-jasa	0.043377	0.050764	0.050635	0.053165	<b>0.049485</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

b. Pengaruh Angkatan Kerja yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur

Angkatan kerja yang bekerja memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pengaruhnya negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.006805. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika jumlah angkatan kerja yang bekerja pada suatu daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruhnya terhadap perubahan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur adalah menurun sebesar -0.006805%. Menurut teori Neoklasik, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan suatu wilayah, dengan kata lain peningkatan dalam jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, dan aliran neoklasik mempercayai bahwa adanya mobilitas faktor yang sempurna. Tenaga kerja akan berpindah dari daerah tertinggal menuju ke daerah yang maju, dimana daerah maju memiliki nilai upah yang relatif lebih tinggi. Sehingga hal tersebut mengakibatkan peningkatan kesenjangan/ketimpangan antara daerah tertinggal dan daerah maju dikarenakan para tenaga kerja produktif memilih untuk bekerja di daerah maju daripada menetap dan bekerja di daerah tertinggal. Namun dalam jangka panjang, ketimpangan tersebut akan sedikit demi sedikit berkurang dikarenakan faktor modal bergerak kearah sebaliknya, yaitu dari daerah maju ke daerah yang kurang maju/tertinggal karena daerah tertinggal mampu memberikan pengembalian yang relatif lebih besar bagi para investor misalnya memiliki upah tenaga kerja yang lebih rendah.

Pada penelitian untuk studi kasus di Provinsi Jawa Timur ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja akan mengurangi angka ketimpangan yang terjadi, hal tersebut dikarenakan para pencari kerja tidak lagi hanya berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan dan bekerja di daerah maju saja, namun sudah mulai menuju daerah lain yang mungkin tingkat pertumbuhannya lebih rendah, sehingga dalam praktiknya teori neoklasik tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di Provinsi Jawa Timur, karena kenyataannya justru mengatakan yang sebaliknya. Hal ini dikarenakan meskipun daerah maju memiliki daya penarik tenaga kerja (upah yang tinggi), namun lapangan pekerjaannya tetap memiliki jumlah yang terbatas, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pencari kerja, sehingga tingkat pengangguran di daerah maju juga tinggi.

Tabel 10: **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Tertinggal (Dengan PDRB Per Kapita di Bawah PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Timur)**

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	Rata-rata
1	Kab. Pacitan	1.16	1.00	1.08
2	Kab. Ponorogo	3.26	3.28	3.27
3	Kab. Trenggalek	3.14	4.12	3.63
4	Kab. Tulungagung	3.18	2.77	2.98
5	Kab. Blitar	2.86	3.74	3.30
6	Kab. Kediri	4.16	4.70	4.43
7	Kab. Malang	3.79	5.20	4.50
8	Kab. Lumajang	4.70	2.06	3.38
9	Kab. Jember	3.91	3.97	3.94
10	Kab. Banyuwangi	3.40	4.69	4.05
11	Kab. Bondowoso	3.75	2.05	2.90
12	Kab. Situbondo	3.31	3.07	3.19
13	Kab. Probolinggo	1.98	3.32	2.65
14	Kab. Pasuruan	6.43	4.35	5.39
15	Kab. Mojokerto	3.42	3.13	3.28
16	Kab. Jombang	6.69	5.60	6.15
17	Kab. Nganjuk	4.22	4.75	4.49
18	Kab. Madiun	4.16	4.70	4.43
19	Kab. Magetan	3.86	3.02	3.44
20	Kab. Ngawi	3.05	5.06	4.06
21	Kab. Bojonegoro	3.51	5.82	4.67
22	Kab. Tuban	4.25	4.33	4.29
23	Kab. Lamongan	4.98	5.00	4.99
24	Kab. Bangkalan	5.32	6.84	6.08
25	Kab. Sampang	1.78	4.74	3.26
26	Kab. Pamekasan	2.30	2.19	2.25
27	Kab. Sumenep	1.19	2.55	1.87
28	Kota Blitar	3.55	6.22	4.89
29	Kota Probolinggo	5.12	4.52	4.82
30	Kota Pasuruan	4.34	5.34	4.84
31	Kota Batu	3.41	2.32	2.87
Rata-rata				3.85

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Tabel 11: **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Maju (Dengan PDRB Per Kapita di Atas PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Timur)**

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	Rata-rata
1	Kab. Sidoarjo	5.21	4.13	4.67
2	Kab. Gresik	6.72	4.51	5.62
3	Kota Kediri	7.85	8.00	7.93
4	Kota Malang	7.68	7.72	7.70
5	Kota Mojokerto	7.32	5.69	6.51
6	Kota Madiun	6.71	6.66	6.69
7	Kota Surabaya	5.07	5.28	5.18
Rata-rata				6.33

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Pada tabel 10 dan 11 diatas menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten/Kota tertinggal (dengan PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten/Kota maju (dengan PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur) pada tahun 2012-2013. Pada tabel tersebut, Kabupaten/Kota maju memiliki rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tertinggal, yaitu sebesar 6,33% pada Kabupaten/Kota maju dan 3,85% pada Kabupaten/Kota

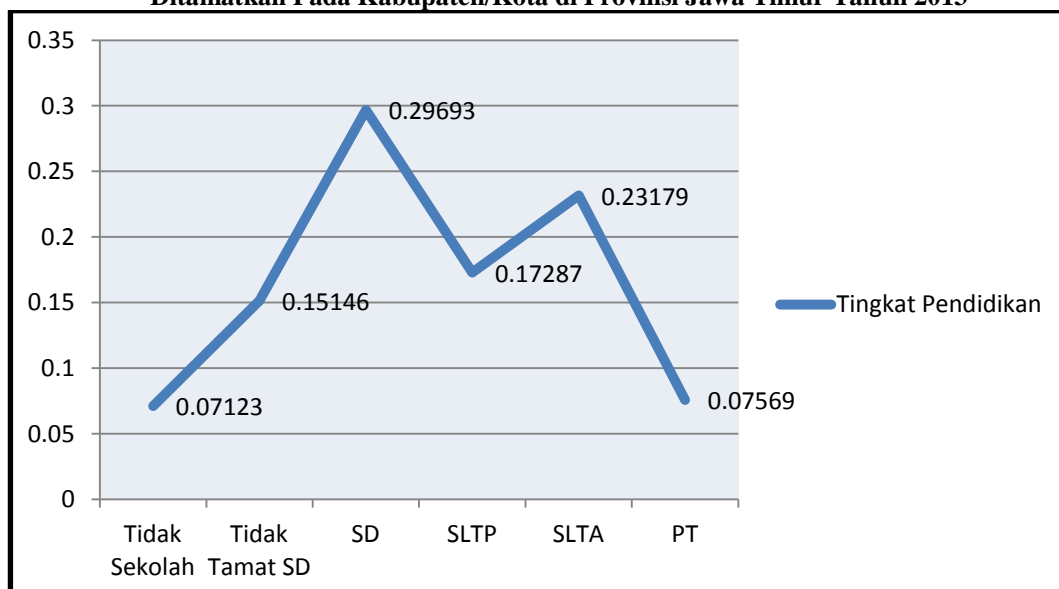
tertinggal. Hal tersebut diakibatkan karena kualitas sumber daya manusia di Kabupaten/Kota maju lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tertinggal, oleh sebab itu persaingan sumber daya manusia dan inovasi menyebabkan masih banyak masyarakat Kabupaten/Kota maju belum terserap pada pasar kerja.

Tingginya tingkat pengangguran serta persaingan para pencari kerja inilah yang membuat para pencari kerja akhirnya menuju daerah lain yang menawarkan lapangan pekerjaan, sehingga angkatan kerja semakin merata. Apabila tenaga kerja/angkatan kerja yang bekerja pada daerah tertinggal meningkat maka akan meningkatkan output daerah tersebut, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

c. Pengaruh Modal Manusia (Pendidikan) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur

Kredit investasi memiliki hubungan positif dengan koefisien 0.000538 namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Menurut teori Neoklasik, selain jumlah modal dan tenaga kerja, kemajuan teknologi juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan suatu wilayah. Kemajuan teknologi ini bisa berkembang pesat apabila faktor sumber daya manusianya memiliki kualitas yang bagus, dan cara untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia salah satunya adalah dengan pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas inovasi pengetahuan dalam perekonomian sehingga akan muncul teknologi baru, produk baru dan proses produksi baru. Muncunya sesuatu yang baru dan lebih bermanfaat akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Apabila pada suatu negara tingkat pendidikannya memiliki jenjang secara baik maka penduduknya akan memiliki kualitas pendidikan yang baik, sehingga akan mendorong penemuan baru yang dapat meningkatkan produktifitas individu maupun perusahaan. Namun pada penelitian ini modal manusia yaitu jumlah angkatan kerja yang telah menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga memiliki angkatan kerja dengan status pendidikan rendah yang cukup tinggi. Misalnya pada gambar 4 di bawah ini, dimana angkatan kerja yang tidak bersekolah memiliki prosentase sebesar 0.07123 dari total angkatan kerja, yang belum/tidak menamatkan sekolah dasar (SD) sebesar 0.15146 dan yang menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar (SD) sebesar 0.29693. Sedangkan angkatan kerja yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 0.07569.

Gambar 4: Angkatan Kerja Berusia 15 Tahun Ke Atas dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Tingginya angka angkatan kerja yang memiliki jenjang pendidikan rendah ini menunjukkan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, sehingga variabel modal manusia dengan menggunakan indikator angkatan kerja yang telah menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

d. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur

Pajak daerah memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pengaruhnya negatif dengan nilai koefisien sebesar  $-0.027029$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika penerimaan pajak daerah yang terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam APBD mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruhnya terhadap perubahan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur adalah menurun sebesar  $-0.027029\%$ .

Menurut teori kebijakan fiskal, peningkatan dalam tarif pajak dari aliran sirkulasi pendapatan akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya jika terjadi penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. Sesuai dengan teori tersebut pada kasus Provinsi Jawa Timur ini, hasil menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, hal ini dikarenakan telah diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal yaitu penyerahan wewenang (mengenai penerimaan dan pengeluaran) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur keuangan daerahnya termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah. Pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan dilimpahkannya wewenang pemungutan pajak daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ini, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat lebih memahami sumber-sumber dan potensi-potensi pajak yang produktif di daerahnya masing-masing, sehingga pemasukan pajak daerah bisa lebih optimal. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber dana untuk melakukan pembangunan, yaitu yang berasal dari penerimaan pajak. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada transformasi ekonomi, transformasi tenaga kerja dan transformasi kelembagaan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efektifitas pembangunan pada daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan dapat berkurang.

Kemudian selain itu, kebijakan yang turut mendukung dalam penyelesaian permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur yaitu masih adanya peran pemerintah pusat dalam pendistribusian pajak daerah, sebagai contoh pajak penghasilan (PPh) yang masih menjadi wewenang dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak penghasilan ini bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin tinggi pula prosentase pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Sehingga kebijakan tersebut mengurangi jarak perbedaan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan yang mencolok antara daerah maju dan daerah tertinggal, dimana daerah maju yang kebanyakan memiliki gaji pegawai (Upah Minimum Kabupaten/Kota) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tertinggal yang memiliki gaji pegawai (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Kemudian pungutan pajak oleh pemerintah pusat itu akan didistribusikan melalui dana perimbangan bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan proporsinya, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur dapat menurun.

e. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur

Pengeluaran pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pengaruhnya negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.004661. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pengeluaran pemerintah daerah yang merupakan total belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tertuang dalam APBD mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruhnya terhadap perubahan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur adalah menurun sebesar -0.073917%.

Menurut teori kebijakan fiskal, peningkatan pengeluaran pemerintah dan/atau penurunan pajak dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menurunkan angka pengangguran. Pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah, dan pengeluaran pemerintah daerah ini juga digunakan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pengeluaran Pemerintah telah diprogramkan/digunakan dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pada penelitian ini pengeluaran pemerintah dapat mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan dikarenakan dana belanja daerah sebagian dialokasikan untuk pengeluaran belanja modal yang dimana dana ini digunakan salah satunya untuk kebutuhan berupa pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik (khususnya bagi daerah tertinggal), maka secara bertahap dapat merubah struktur ekonomi daerah tertinggal tersebut dari yang awalnya masih berstruktur ekonomi tradisional menuju struktur ekonomi modern, sehingga tingkat ketimpangan pembangunan dapat berkurang.

Tabel 12: Alokasi Untuk Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Tertinggal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Belanja Modal	Rata-rata Pengeluaran Pemerintah	Prosentase Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran
1	Kab. Pacitan	114689502000	803615553600	0.142717
2	Kab. Ponorogo	148883431200	1090627104600	0.136512
3	Kab. Trenggalek	135243534400	901989481800	0.149939
4	Kab. Tulungagung	167816858800	1204246409600	0.139354
5	Kab. Blitar	196836155400	1212756902400	0.162305
6	Kab. Kediri	309441948800	1428162728800	0.216671
7	Kab. Malang	365734511400	1920605489200	0.190427
8	Kab. Lumajang	153507151200	1058116370400	0.145076
9	Kab. Jember	317438126000	1819288174400	0.174485
10	Kab. Banyuwangi	347876431600	1499292069000	0.232027
11	Kab. Bondowoso	200165948600	888875286200	0.22519
12	Kab. Situbondo	241916788400	846962090800	0.285629
13	Kab. Probolinggo	319410148000	1063169468800	0.300432
14	Kab. Pasuruan	349613024400	1433512926000	0.243886
15	Kab. Mojokerto	168728097400	1035296720000	0.162976
16	Kab. Jombang	166205749600	1163127074000	0.142896
17	Kab. Nganjuk	233774487000	1178011213400	0.198448
18	Kab. Madiun	157487723000	912796529200	0.172533
19	Kab. Magetan	167752593200	923982009200	0.181554
20	Kab. Ngawi	216310517800	1021586844000	0.21174
21	Kab. Bojonegoro	274142058200	147406555200	0.185977
22	Kab. Tuban	293389837200	1189574542200	0.246634
23	Kab. Lamongan	248955024600	1237308185000	0.201207
24	Kab. Bangkalan	295816275200	1057017798200	0.279859
25	Kab. Sampang	297990938200	906128474000	0.328862
26	Kab. Pamekasan	169818986400	957708882400	0.177318
27	Kab. Sumenep	214316895200	1153215312200	0.185843
28	Kota Blitar	135032442800	460454849200	0.293259

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Belanja Modal	Rata-rata Pengeluaran Pemerintah	Prosentase Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran
29	Kota Probolinggo	153206704200	564250322000	0.271523
30	Kota Pasuruan	104227084400	465599155000	0.223856
31	Kota Batu	143977705800	448564357600	0.320974
Rata-rata				0.210649

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah

Tabel 13: **Alokasi Untuk Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Maju di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013**

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Belanja Modal	Rata-rata Pengeluaran Pemerintah	Prosentase Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran
1	Kab. Sidoarjo	363143858400	1916373635600	0.189495
2	Kab. Gresik	154422377600	1293786369800	0.119357
3	Kota Kediri	154916190000	762958826800	0.203047
4	Kota Malang	244280792400	1111823544400	0.219712
5	Kota Mojokerto	106499712600	461767168200	0.230635
6	Kota Madiun	112722073400	549091916200	0.205288
7	Kota Surabaya	1328782274000	4579654972800	0.290149
Rata-rata				0.20824

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengalokasian dana pengeluaran pemerintah secara tepat (khususnya pada wilayah tertinggal) adalah salah satu alasan mengapa dapat terjadi penurunan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Apabila dana pengeluaran pemerintah banyak dialokasikan pada belanja produktif, misalnya untuk belanja modal, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sebaliknya apabila dana pengeluaran pemerintah banyak dialokasikan pada belanja yang kurang produktif, misalnya untuk membiayai belanja pegawai, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi wilayah. Belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji dan pembayaran honor kegiatan-kegiatan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil. Belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas hanya dapat menambah penghasilan dari pegawai pemerintahan, dan belanja perjalanan dinas tersebut kebanyakan hanya digunakan untuk keperluan yang kurang penting seperti rapat dan kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor, meskipun rapat dan kegiatan tersebut sebenarnya dapat dilakukan di dalam kantor. Pengeluaran dana untuk belanja pegawai tersebut tidak efisien untuk proses pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga sebisa mungkin dana belanja pegawai harus ditekan dan disisi lain alokasi pengeluaran pemerintah untuk belanja produktif semakin ditingkatkan.

Pada tabel 12, alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota tertinggal di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 hingga 2013 memiliki rata-rata sebesar 0.210649, sedangkan pada tabel 13 Kabupaten/Kota maju memiliki rata-rata yang lebih rendah yaitu sebesar 0.20824. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pada daerah-daerah tertinggal alokasi dana pengeluaran pemerintah untuk belanja yang produktif lebih tinggi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal juga semakin cepat, dan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di provinsi Jawa Timur dapat menurun.

Kemudian selain itu, alokasi dana pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk transfer payment bagi masyarakat juga dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian wilayah. Sesuai dengan salah satu fungsi APBD yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. APBD selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa dan dana pensiun. Penyaluran transfer payment (khususnya pada daerah tertinggal) ini akan dapat meningkatkan penerimaan agregat pada suatu wilayah, sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah akan meningkat dan ketimpangan antar wilayah dapat menurun.



## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji F menjelaskan bahwa kelima variabel independen yaitu kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
2. Hasil uji t menjelaskan bahwa tiga variabel independen yaitu angkatan kerja yang bekerja, pajak dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dua variabel independen yaitu kredit investasi dan modal manusia (pendidikan) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil regresi tersebut diketahui bahwa tiga variabel independen yang berpengaruh signifikan yaitu angkatan kerja yang bekerja, pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien berslope negatif, ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun penelitian ketiga variabel tersebut telah membuat angka ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur menurun dan menuju kearah pemerataan (konvergensi).

### Saran

Untuk melengkapi penelitian ini agar menjadi lebih baik penulis merasa perlu memberikan saran-saran diantaranya:

1. Rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan ekonomi agar tidak hanya memfokuskan pada aspek peningkatan nilai saja namun juga harus lebih memperhatikan aspek pemerataan pembangunan itu sendiri. Diharapkan lebih banyak program-program pembangunan yang diarahkan pada kabupaten/kota tertinggal, supaya kedepannya aliran investasi pada daerah-daerah tersebut bisa lebih baik yang kemudian akan banyak perusahaan atau pabrik yang berdiri dan berkembang, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Lalu peningkatan investasi pemerintah bagi modal manusia khususnya bidang pendidikan di kabupaten/kota tertinggal juga perlu untuk ditingkatkan demi terlahirnya bibit-bibit manusia yang lebih unggul dan produktif sehingga dapat memberikan inovasi baru dan mempermudah mempelajari maupun membuat teknologi-teknologi baru agar pertumbuhan daerah tersebut semakin tinggi.
2. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota (khususnya yang tertinggal) juga sebaiknya terus menggali potensi-potensi pajak daerah yang selama ini belum optimal, misalnya pemungutan pajak daerah yang belum terkoordinir dengan baik hingga masih maraknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian pemerintah juga sebaiknya memberikan suntikan melalui pengeluaran pemerintah dalam anggaran belanja pemerintah dengan tepat sasaran, sehingga aspek-aspek yang menjadi prioritas mendapatkan fokus perhatian utama.
3. Diharapkan pemerintah Provinsi segera menyelesaikan proyek yang beberapa tahun ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten/kota tertinggal yaitu pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur merupakan pembangunan jalan baru yang membentang sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur mulai dari Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi dengan panjang keseluruhan 634,11 Km. JLS Jawa Timur merupakan bagian dari JLS Pulau Jawa. Pembangunan JLS Jawa Timur merupakan Kesepakatan 5 Gubernur Pulau Jawa pada Bulan Pebruari 2004. Seperti yang diketahui bahwa Pembangunan JLS merupakan salah satu Program Strategis Jawa Timur yang bermanfaat sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi selain untuk meminimalisir kesenjangan pembangunan kawasan

utara dan selatan Jawa Timur. Pembangunan Jalur Lintas Selatan ini juga diproyeksikan untuk mengoptimalkan objek wisata di kawasan selatan Provinsi Jawa Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, H W and Taylor, J. 2000. *Regional Economics and Policy*, 3<sup>rd</sup> edition, Blackwell, Oxford.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Atmanti, Hastarini D. 2005. Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2, No.1, Hal. 30-39.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2009-2013*. <http://bps.jatim.go.id>. Diakses pada 15 Desember 2014.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa 2008-2012*. <http://bps.go.id>. Diakses pada 15 Desember 2014.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Timur 2012*. <http://bps.jatim.go.id>. Diakses pada 15 Desember 2014.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*. <http://bps.jatim.go.id>. Diakses pada 15 Desember 2014.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Angkatan Kerja yang Bekerja Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Pendidikan yang Ditamatkan Angkatan Kerja Hingga Perguruan Tinggi Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Pajak Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Balanza Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*, Surabaya.
- Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. 2015. *Penyaluran Kredit Investasi Bank Umum dan BPR Kabupaten/Kota Jawa Timur 2009-2013*, Surabaya.
- Barika. 2012. Analysis Of Regional Disparities Regencies/Cities In the Province Of Bengkulu Year 2005-2009. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Regional: Volume: 04. No. 03*.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Gama, Ayu Safitri. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per

Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial: Volume 2 Nomor 1*.

Gujarati, Damodar N and Dawn C Porter. 2009. *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill Inc: New York.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)*. 2013. Surabaya: Bappeda Jawa Timur.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Universitas Indonesia dengan Bima Grafika.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Williamson, J G. 1997. *Industrialization, Inequality and Economic Growth*. Brookfield: Edward Elgar Publishing Company.

Yeniwati. 2003. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. Universitas Negeri Padang: *Jurnal Kajian Ekonomi, Juli 2013, Vol. II, No. 03*.